Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No.6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/pnff3854
Hal. 11856-11868

Peran Tiktok dalam Mobilisasi Aksi Menolak Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025: Studi Kasus Aliansi Mahasiswa Malikussaleh

Rut Valentina Tarigan[1], Dahlan A. Rahman[2], Muhammad Bin Abubakar[3], Zulhilmi[4], Awaluddin Arifin[5]
[1-5]Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Indonesia

Email Korespondensi: rutvalentinatarigan0@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima *14-11-2026*
Disetujui *24-11-2026*
Diterbitkan *26-11-2026*

In 2025, Lhokseumawe City raised its Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) by up to 280 percent, prompting the Malikussaleh Student Alliance to hold a protest at the Lhokseumawe City Council (DPRK) on 1 September 2025. This study analyzes how TikTok was used to mobilize the protest and examines the obstacles to and effectiveness of converting digital discontent into physical mass action. A qualitative single case study design was employed. Data were collected through in-depth interviews with four key informants (the Chair of the Universitas Malikussaleh Student Executive Board, the field coordinator, and two protest participants), cyber observation of six TikTok posts uploaded on the day of the protest, and document study, and were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. The findings show that TikTok was used in two distinct phases. In the pre-action phase, it served to build public opinion and invite participation through short videos, satire, hashtags, location tags, and For You Page (FYP) exposure reinforced by WhatsApp groups, which lowered psychological barriers to joining. During the protest, TikTok functioned only as a documentation and crowd-monitoring tool, while tactical command relied on the command vehicle and faculty-based node coordinators. Network disruptions, buzzer counter-narratives, and dependence on platform algorithms did not derail the protest because the alliance had prepared a physical backup command structure. The protest ended peacefully and the tax increase was revoked. The study concludes that effective mobilization resulted from a hybrid of connective action in the digital sphere and conventional collective action in the field.

Keywords: *TikTok; mass mobilization; connective action; land and building tax; digital public sphere*

ABSTRAK

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Lhokseumawe menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 280 persen sehingga memicu aksi Aliansi Mahasiswa Malikussaleh di Gedung DPRK Lhokseumawe pada 1 September 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola penggunaan TikTok dalam mobilisasi aksi tersebut serta menguraikan hambatan dan efektivitas konversi ketidakpuasan digital menjadi aksi massa nyata. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat informan kunci (Ketua BEM Universitas Malikussaleh, koordinator lapangan, dan dua mahasiswa peserta aksi), observasi siber terhadap enam konten TikTok yang diunggah pada hari aksi, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok digunakan dalam dua fase yang berbeda fungsi. Pada fase pra-aksi, TikTok berfungsi sebagai sarana penggalangan opini dan ajakan massa melalui video pendek, konten satire, tagar, penanda lokasi, dan paparan di beranda For Your Page (FYP) yang diperkuat oleh grup WhatsApp sehingga menurunkan hambatan psikologis untuk

berpartisipasi. Pada fase pelaksanaan, TikTok hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi dan pemantauan massa, sedangkan komando taktis bertumpu pada mobil komando dan koordinator simpul berbasis fakultas. Gangguan jaringan, narasi tandingan buzzer, dan ketergantungan pada algoritma platform tidak menggagalkan aksi karena aliansi telah menyiapkan struktur komando fisik cadangan. Aksi berakhir damai dan kenaikan tarif dibatalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mobilisasi lahir dari perpaduan hibrida antara connective action *di ruang digital dan* collective action *konvensional di lapangan.*

***Kata kunci**: TikTok; Mobilisasi Massa; Connective Action; Pajak Bumi dan Bangunan; Ruang Publik Digital*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Valentina Tarigan, R., Rahman, D. A. ., Bin Abubakar, M. ., Zulhilmi, Z., & Arifin, A. . (2026). Peran Tiktok dalam Mobilisasi Aksi Menolak Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2025: Studi Kasus Aliansi Mahasiswa Malikussaleh. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 11856-11868. https://doi.org/10.63822/pnff3854

PENDAHULUAN

Demonstrasi merupakan wujud aksi kolektif (*collective action*) yang telah lama menjadi instrumen penting dalam mekanisme *checks and balances* pada sistem demokrasi (Sabrina, 2025). Di Indonesia, gerakan massa yang dimotori mahasiswa dan masyarakat sipil telah menjadi kekuatan sosiopolitik yang menentukan, terutama pada periode 1966 dan 1998. Demonstrasi tidak sekadar berupa mobilisasi fisik di jalanan, melainkan juga arena tempat warga mengklaim hak-hak demokratisnya di ruang publik untuk menantang kebijakan yang dianggap tidak lagi mewakili kepentingan rakyat (Damantu & Arief, 2025).

Perkembangan teknologi digital menggeser logika gerakan tersebut. Jika pada era pra-digital mobilisasi bergantung pada organisasi formal yang hierarkis dengan alur komunikasi *top-down*, gerakan massa pada dekade 2020-an cenderung lebih cair dan desentralistik (Musyrifah & Edtiyarsih, 2025; Nugroho et al., 2025). Bennett dan Segerberg (2012) menyebut pergeseran ini sebagai *logic of connective action*, yakni partisipasi yang tidak lagi mensyaratkan afiliasi organisasi formal, tetapi terbangun melalui jejaring digital yang personal dan horizontal. Tufekci (2017) menambahkan bahwa aktivisme digital ditandai oleh partisipasi berbiaya rendah (*low-cost participation*), mobilisasi viral, fokus pada isu spesifik, dan keberlanjutan yang rapuh karena bergantung pada perhatian publik dan dinamika algoritma. Media sosial pun berubah menjadi infrastruktur politik yang mampu menembus dominasi narasi media arus utama (Abdullah et al., 2025; Castells, 2012) dan menghadirkan apa yang disebut sebagai ruang publik digital (*digital public sphere*), yaitu revitalisasi gagasan ruang publik Habermas dalam masyarakat informasi (Ismail & Prananda, 2025).

Fenomena tersebut tampak jelas dalam gelombang penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2025. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, penetapan PBB-P2 merupakan kewenangan pemerintah daerah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dapat disesuaikan secara berkala mengikuti harga pasar tanah (Pemerintah Indonesia, 2022; Bisnis.com, 2025). Penyesuaian NJOP yang besar di sejumlah daerah memicu protes, antara lain di Kabupaten Pati pada 13 Agustus 2025 yang menolak kenaikan sebesar 250 persen. Sekitar 104 daerah tercatat menaikkan PBB-P2, 20 di antaranya lebih dari 100 persen, hingga pemerintah pusat meminta kepala daerah menunda atau mencabut kebijakan yang memberatkan (Hukumonline, 2025a, 2025b). Di Kota Lhokseumawe, tarif PBB-P2 yang berlaku sejak 1 Januari 2025 naik hingga 280 persen berdasarkan keputusan yang ditandatangani Penjabat Wali Kota pada tahun 2024 (IKPI, 2025).

Kenaikan tersebut ditolak oleh Aliansi Mahasiswa Malikussaleh melalui aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe pada 1 September 2025. Ajakan dan narasi penolakan beredar luas melalui TikTok sebelum hari aksi. Berbeda dengan sejumlah kota lain di Aceh yang diwarnai kericuhan, aksi di Lhokseumawe berlangsung damai dan berakhir dengan penandatanganan petisi oleh Wali Kota dan Ketua DPRK Lhokseumawe. Pemerintah Kota kemudian mencabut kenaikan tersebut dan mengembalikan tarif ke ketentuan sebelumnya; dari 63.959 wajib pajak, 1.180 orang yang telanjur membayar dengan tarif baru akan menerima pengembalian dana (IKPI, 2025). Kombinasi antara mobilisasi digital yang masif dan pelaksanaan aksi yang tertib menjadikan kasus ini relevan untuk dikaji.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan peran media sosial dalam gerakan protes. Perkasa (2025) menemukan bahwa konten visual seperti infografis dan poster instruksional berfungsi sebagai alat pembebasan kognitif (*cognitive liberation*) yang mengubah simpati digital menjadi kehadiran fisik, tetapi kajiannya menggunakan pendekatan *life history* pada individu di Jakarta. Apriyani (2021) menunjukkan bahwa tagar seperti #GejayanMemanggil membentuk jaringan horizontal yang melemahkan struktur organisasi hierarkis, namun berfokus pada gerakan berskala nasional tahun 2019. Aliyan dan Anshar (2025)

mengkaji advokasi digital dalam konflik tambang melalui studi pustaka, Rahmani et al. (2025) menelaah aliansi GEBRAK dari perspektif hukum, sedangkan Febriantin dan Anggrayni (2025) menyoroti media sosial sebagai infrastruktur penguatan internal serikat buruh. Belum banyak kajian yang menelaah secara empiris bagaimana platform video pendek seperti TikTok bekerja bersama struktur organisasi mahasiswa dalam gerakan lokal yang menolak kebijakan fiskal daerah, terutama di kota menengah di luar Jawa.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan: (1) bagaimana pola penggunaan TikTok, yang mencakup karakteristik konten, narasi visual, dan pemanfaatan algoritma, dalam mobilisasi massa menolak kenaikan PBB-P2 tahun 2025 di Kota Lhokseumawe; dan (2) apa hambatan dan bagaimana efektivitas ruang publik digital di TikTok dalam mengonversi mosi tidak percaya digital menjadi mobilisasi massa nyata di Gedung DPRK Lhokseumawe. Untuk menjawabnya, penelitian ini memadukan teori *connective action* dan aktivisme digital (Bennett & Segerberg, 2012; Tufekci, 2017) dengan teori perilaku kolektif (Smelser, 1962), mobilisasi sumber daya (McCarthy & Zald, 1977), partisipasi politik non-konvensional (Marsh & Kaase, 1979), dan gerakan sosial baru (Melucci, 1989). Kebaruan penelitian ini terletak pada penelaahan TikTok sebagai bagian dari model mobilisasi hibrida pada gerakan mahasiswa lokal di Aceh, yang diharapkan memperkaya kajian komunikasi politik dan gerakan sosial digital serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang sensitif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus tunggal (*single case study*). Menurut Yin (2018), studi kasus tepat digunakan ketika pertanyaan penelitian berbentuk "bagaimana", peneliti tidak mengendalikan peristiwa, dan fokus kajian adalah peristiwa kontemporer dalam konteks kehidupan nyata. Kasus yang dikaji adalah penggunaan TikTok dalam mobilisasi aksi menolak kenaikan PBB-P2 oleh Aliansi Mahasiswa Malikussaleh. Batas waktu kasus mencakup munculnya penolakan pada tahun 2025, aksi 1 September 2025, hingga pencabutan kebijakan, dengan batas tempat Kota Lhokseumawe, khususnya Lapangan Hiraq sebagai titik kumpul dan Gedung DPRK sebagai titik tuntutan. Kasus ini dipilih karena bersifat instruktif: aksi berlangsung damai dan berhasil mencapai tuntutannya, berbeda dengan aksi serupa di beberapa kota lain di Aceh. Tujuannya bukan menggeneralisasi, melainkan memahami mekanisme mobilisasi dalam konteks lokal.

Informan dipilih melalui teknik *purposive* dan *snowball sampling* (Sugiyono, 2021). Purposive sampling digunakan untuk menentukan aktor kunci yang terlibat langsung dalam perencanaan dan pelaksanaan aksi, sedangkan snowball sampling digunakan untuk menjaring mahasiswa peserta aksi berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya. Profil informan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Informan	Posisi dalam Aksi	Kontribusi Data Utama
1	Muhammad Ilal Sinaga	Ketua BEM Universitas Malikussaleh; terlibat dalam konsolidasi isu dan keputusan aksi	Fungsi kelembagaan TikTok, koordinasi antarfakultas, sikap terhadap buzzer dan gangguan jaringan
2	Ikhlasul Absori	Koordinator Lapangan (Korlap) yang memimpin teknis komando saat aksi	Skenario taktis, sistem koordinator simpul, mitigasi gangguan sinyal
3	Abdul Salahudin	Mahasiswa peserta aksi	Akses informasi, motivasi, dan dampak gangguan jaringan

No	Informan	Posisi dalam Aksi	Kontribusi Data Utama
4	Atha Illah Fakhiy Mursya	Mahasiswa peserta aksi	Akses informasi, motivasi, dan dampak gangguan jaringan

(Sumber: Data primer, diolah 2026)

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara tatap muka dan observasi siber terhadap konten TikTok. Konten dipilih secara purposif dengan tiga kriteria: diunggah pada 1 September 2025, memuat aksi mahasiswa di Kota Lhokseumawe, dan memperlihatkan interaksi publik berupa jumlah suka, komentar, simpan, dan bagikan. Hasilnya adalah enam konten dari lima akun berbeda, yaitu akun pejabat, akun dokumentasi, dan pengguna umum; akun resmi aliansi tidak termasuk di dalamnya. Interaksi dicatat pada saat tangkapan layar diambil. Data sekunder diperoleh dari dokumen, pemberitaan, dan literatur yang relevan. Penggunaan beberapa sumber bukti ini mengikuti prinsip triangulasi dalam studi kasus (Yin, 2018).

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah hasil wawancara dan analisis isi konten TikTok sesuai fokus penelitian. Data disajikan dalam bentuk narasi kronologis dan matriks tematik konten, kemudian kesimpulan ditarik dengan mengintegrasikan temuan lapangan dan temuan siber serta menafsirkannya menggunakan kerangka teori yang telah diuraikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsolidasi Aksi Aliansi Mahasiswa Malikussaleh

Aksi 1 September 2025 digerakkan oleh koalisi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas fakultas di Universitas Malikussaleh. Keresahan mahasiswa bertumpu pada lonjakan tagihan PBB-P2 hingga 280 persen yang dinilai tidak sebanding dengan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur daerah. Keputusan untuk turun ke jalan tidak lahir secara spontan, melainkan melalui forum internal tim kajian dan tim taktis BEM Universitas bersama para ketua BEM fakultas. Ketua BEM menjelaskan alur tersebut sebagai berikut.

> *"Kita punya tim kajian, tim taktis. Nanti tim kajiannya itu yang kasih gambaran ini harus kita buat aksi. Nah, dari kita BEM Unimal menyiapkan isu, berapa isu. Nanti kita kumpulkan ketua-ketua BEM lainnya... di situ baru kita sepakati, sepakat tidak kita demo? Sepakat! Kita berangkat, berarti amankan massa masing-masing."*
>
> (Wawancara, Ketua BEM Universitas Malikussaleh, 2025)

Struktur komando aksi menggunakan sistem koordinator simpul, yaitu pendelegasian tanggung jawab pengarahan dan pengamanan massa kepada ketua BEM masing-masing fakultas di bawah koordinasi seorang Koordinator Lapangan (Korlap). Dengan demikian, gerakan ini sejak awal berpijak pada struktur organisasi formal kampus, sementara TikTok digunakan untuk memperluas jangkauan ajakan di luar struktur tersebut.

Pola Penggunaan TikTok pada Fase Pra-Aksi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan TikTok terpola ke dalam dua fase yang berbeda fungsi. Pada fase pra-aksi, TikTok menjadi kanal utama penyebaran narasi ketidakpuasan atas kenaikan PBB-P2. Menurut keterangan informan, konten yang beredar berupa informasi besaran kenaikan tarif, ajakan langsung untuk bergabung, hingga video bernuansa satire terhadap kebijakan daerah. Peserta aksi

memperoleh informasi dari kombinasi grup WhatsApp komunitas dan beranda *For Your Page* (FYP) TikTok.

> *"Awalnya aku dapet kabar dari grup WhatsApp warga dan komunitas tempat nongkrong, terus rame juga pas liat lalu-lalang di FYP TikTok. Karena udah jadi obrolan hangat di mana-mana, makin mantap deh buat ikut turun."*
>
> (Wawancara, peserta aksi, 2025)

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa mobilisasi tidak berjalan melalui satu saluran, tetapi melalui jaringan interpersonal (grup WhatsApp) dan jaringan algoritmik (FYP) yang saling menguatkan. Keputusan untuk berpartisipasi lahir dari akumulasi paparan berulang di berbagai kanal yang menegaskan urgensi isu yang sama. Selain keterpaparan informasi, motivasi ekonomi menjadi pendorong utama: peserta aksi menggambarkan kenaikan PBB sebagai beban yang "bener-bener nyekik" bagi keuangan keluarga sehingga isu tersebut terasa konkret, bukan wacana abstrak. Konten ajakan di TikTok juga membangun keyakinan bahwa aksi akan berjalan damai, sehingga hambatan psikologis untuk ikut serta menurun.

> *"Jujur, konten-konten ajakan di TikTok emang ngebantu banget ngebakar semangat dan bikin merasa nggak berjuang sendirian. Selain itu, narasi di sosmed sebelum hari-H juga ngeset ekspektasi kalau aksi ini murni perjuangan damai, jadi bikin lumayan yakin dan merasa aman buat gabung."*
>
> (Wawancara, peserta aksi, 2025)

Dari sisi kelembagaan, Ketua BEM menilai fitur siaran langsung (*live*) TikTok berguna untuk mengajak dan menghimpun massa sekaligus mengukur besarnya dukungan menjelang aksi. Namun, Korlap menegaskan bahwa meskipun TikTok sangat cepat dan efektif untuk menggerakkan opini, massa yang turun pada hari aksi tetap didominasi mahasiswa yang terkonsolidasi melalui struktur organisasi kampus (Wawancara, Korlap, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa TikTok memperluas dan mempercepat ajakan, tetapi tidak menggantikan peran organisasi dalam memastikan kehadiran massa.

TikTok pada Fase Pelaksanaan Aksi

Berbeda dengan asumsi bahwa TikTok juga berfungsi sebagai kanal instruksi taktis, seluruh informan menyatakan bahwa fungsi tersebut tidak berlaku. Pada hari aksi, TikTok hanya digunakan sebagai media dokumentasi dan alat bantu visual bagi tim media untuk memantau kondisi massa di barisan belakang yang tidak terlihat dari depan.

> *"Untuk koordinasi taktis dan instruksi lapangan, pastinya kita enggak menggunakan aplikasi TikTok. Tapi ketika di lapangan nantinya, kita menggunakan TikTok sebagai media untuk dokumentasi... mengonfirmasi bagaimana keadaan massa di belakang."*
>
> (Wawancara, Ketua BEM Universitas Malikussaleh, 2025)

Peserta aksi membenarkan pola ini. Mereka sempat memantau TikTok pada awal aksi, tetapi begitu massa semakin padat, sumber informasi utama sepenuhnya beralih ke orasi dari mobil komando. Dengan demikian, terdapat pembagian peran yang jelas: TikTok unggul pada fase penggalangan yang membutuhkan jangkauan luas, sedangkan pada fase eksekusi otoritas informasi kembali ke struktur komando langsung di lapangan. Pergeseran ini mencerminkan kesadaran taktis aktor gerakan bahwa media digital memiliki keterbatasan ketika massa telah terkumpul, baik dari sisi jangkauan suara maupun risiko gangguan teknis.

Karakteristik Konten, Narasi Visual, dan Pemanfaatan Algoritma

Enam konten yang diamati berupa lima video pendek dan satu unggahan foto berseri sebanyak 35 slide, seluruhnya diunggah pada 1 September 2025 oleh lima akun berbeda. Konten tentang aksi dengan demikian tidak bersumber dari satu akun komando, tetapi diproduksi dan diedarkan oleh banyak pihak secara bersamaan. Interaksi publik terhadap konten tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Interaksi Publik pada Konten TikTok Aksi 1 September 2025

Akun	Isi Utama Konten	Suka	Komentar	Simpan	Bagikan	Bagikan/ Suka (%)
paseimages.id	Orasi mahasiswa; teks "hentikan represifitas petugas"	±49.500	1.552	2.820	6.167	12,5
Ajie.Sales_YAMAHA ACEH	Massa berjalan membawa bendera dan spanduk	5.083	168	168	324	6,4
Dosen Tangguh (1)	Orasi damai dan tertib di jalan	2.481	88	142	150	6,0
Bang_Faisal.hajiisa	Ketua DPRK menemui demonstran	1.198	71	85	124	10,4
Dosen Tangguh (2)	Wali Kota, Ketua DPRK, dan Kapolres bersama mahasiswa	791	25	39	61	7,7
Taministy	Foto berseri "Aksi Damai di Kota Lhokseumawe"	101	–	3	18	17,8

(Sumber: Tangkapan layar TikTok 1 September 2025, diolah 2026). Keterangan: – = tidak tercatat.

Narasi visual konten relatif seragam. Pertama, jas almamater hijau dan bendera merah putih muncul di hampir semua konten sehingga aksi tampil sebagai gerakan bersama mahasiswa. Kedua, teks sampul dan keterangan menekankan kata damai, seperti "Aksi Damai di Kota Lhokseumawe" dan "Orasi Damai dan Tertib". Ketiga, sebagian konten menampilkan pejabat bersama mahasiswa, yaitu Ketua DPRK serta Wali Kota, Ketua DPRK, dan Kapolres, sehingga muncul kesan bahwa tuntutan didengar dan dialog terjadi. Keempat, spanduk dan teks sampul memperlihatkan tuntutan yang lebih luas daripada isu PBB, seperti "#Reformasi Polri", "hentikan represifitas petugas", dan penolakan terhadap pembentukan lima batalyon di Aceh. Narasi damai sejalan dengan keterangan peserta bahwa konten TikTok membuat mereka yakin aksi akan aman, sedangkan tuntutan yang melebar menunjukkan bahwa aksi di Lhokseumawe terhubung dengan isu nasional yang sedang mengemuka sehingga peran TikTok tidak dapat dibaca semata-mata sebagai kanal isu PBB.

Pemanfaatan algoritma ditelaah berdasarkan sinyal yang digunakan TikTok untuk merekomendasikan video di beranda FYP, yaitu interaksi pengguna, informasi video seperti keterangan, suara, dan tagar, serta pengaturan perangkat dan akun (TikTok, 2020). Dalam kerangka tersebut, terdapat tiga pola. Pola pertama adalah pengaturan informasi video melalui tagar yang menggabungkan isu lokal

dan nasional (#aceh, #fyp, #viral, #demo, #Demomahasiswa, #kotalhokseumawe), penanda lokasi "DPRK Lhokseumawe", teks sampul, serta lagu latar "Tanah Airku". Pola kedua adalah interaksi pengguna yang tinggi; sebagaimana terlihat pada Tabel 2, jumlah bagikan berkisar 6–18 persen dari jumlah suka, yang menandakan penonton tidak hanya menonton tetapi juga meneruskan konten. Pola ketiga adalah pengulangan lintas konten dan akun: beberapa akun mengunggah peristiwa yang sama dengan pesan serupa sehingga pengguna yang menonton satu video cenderung bertemu video lain bertema sama. Data ini tidak membuktikan bahwa algoritma menyebabkan seseorang ikut aksi, tetapi menunjukkan bahwa konten aksi memperoleh respons yang cukup untuk diperluas jangkauannya oleh sistem rekomendasi. Ringkasan tema konten berdasarkan wawancara dan observasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks Tematik Konten TikTok dalam Mobilisasi Aksi

Tema Konten	Karakteristik	Fungsi Mobilisasi	Fase
Infografis kenaikan tarif PBB	Perbandingan angka NJOP lama dan baru secara ringkas	Membangun kesadaran atas ketimpangan kebijakan (*cognitive liberation*)	Pra-aksi
Video ajakan aksi	Ajakan hadir di titik kumpul, memuat waktu dan lokasi	Penggalangan dan penghimpunan massa	Pra-aksi
Sindiran/komedi kebijakan	Konten satire yang mengemas isu pajak secara ringan	Meningkatkan resonansi emosional dan viralitas isu	Pra-aksi
Siaran langsung dan dokumentasi	Kondisi massa dari titik kumpul dan barisan aksi	Dokumentasi, pemantauan massa, bukti dukungan publik	Pelaksanaan
Komentar buzzer/narasi tandingan	Komentar yang menyudutkan atau mengalihkan isu	Delegitimasi gerakan (dihadapi secara pasif)	Pra-aksi dan pelaksanaan

(Sumber: Hasil wawancara dan observasi siber, diolah 2026)

Perlu dicatat bahwa konten yang diamati adalah konten yang beredar pada hari aksi. Infografis dan video sindiran pra-aksi diketahui melalui keterangan informan dan tidak tertangkap dalam observasi, sehingga tema pada Tabel 3 sebagian bersumber dari data wawancara.

Hambatan Ruang Publik Digital

Hambatan teknis utama adalah gangguan sinyal atau *shutdown* jaringan internet secara mendadak di lokasi aksi. Peserta aksi mengaku sempat bingung karena koordinasi dengan rekan yang terpisah terputus, tetapi situasi tidak berubah menjadi kepanikan karena komando di lapangan tetap terdengar jelas. Ketua BEM memaknai gangguan tersebut bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan indikasi pembatasan ruang berpendapat, sebab menurutnya hal serupa terjadi di berbagai kota pada momentum aksi yang sama. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa infrastruktur digital dapat menjadi objek kontestasi politik, meskipun penyebab pastinya belum dapat dikonfirmasi dengan data resmi operator. Hambatan ini dimitigasi melalui skenario cadangan yang telah disiapkan sejak awal.

> *"Korlap langsung beralih total ke koordinasi fisik secara langsung (tatap muka) melalui para koordinator simpul. Skenario ini terbukti berjalan baik saat terjadi shutdown jaringan pada aksi 1 September 2025 di Lhokseumawe."*
>
> (Wawancara, Korlap, 2026)

Hambatan non-teknis berupa komentar bernuansa buzzer dan narasi tandingan di kolom komentar yang berupaya melemahkan legitimasi isu. Baik peserta maupun pimpinan aliansi relatif tidak terpengaruh. Peserta menilai narasi semacam itu "cuma berisik di dunia maya", sedangkan Ketua BEM memandangnya sebagai bagian dari kebebasan berpendapat yang tidak perlu dihadapi secara reaktif karena legitimasi gerakan akan dinilai oleh masyarakat yang merasakan dampak kebijakan. Sikap non-konfrontatif ini menjaga energi gerakan tetap terfokus pada tuntutan substantif alih-alih terjebak dalam perang wacana di ruang komentar.

Hambatan ketiga bersifat struktural, yaitu ketergantungan pada algoritma platform. Ketua BEM menyadari bahwa algoritma dikendalikan oleh pemilik aplikasi dan dapat dipengaruhi oleh pihak berkuasa, meskipun ia tetap menilai TikTok jauh lebih cepat dan hemat tenaga dibandingkan konsolidasi konvensional dari "satu meja ke satu meja" (Wawancara, Ketua BEM, 2025). Kesadaran ini membuat aliansi tidak menggantungkan keberhasilan aksi pada algoritma dan memanfaatkannya terutama pada fase pra-aksi.

Efektivitas Konversi: Model Mobilisasi Hibrida

Efektivitas konversi mosi tidak percaya digital menjadi aksi nyata tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan TikTok, tetapi oleh perpaduan viralitas digital pada fase pra-aksi dan struktur komando konvensional yang solid pada fase pelaksanaan. Korlap menegaskan bahwa pada hari aksi, pengarahan langsung jauh lebih efektif karena tidak bergantung pada algoritma, bebas dari risiko gangguan sinyal, dan dapat diterima secara instan oleh koordinator lapangan, sedangkan media sosial lebih efektif untuk penggalangan massa skala besar sebelum aksi (Wawancara, Korlap, 2026). Struktur per fakultas juga berfungsi menyaring provokator karena setiap ketua BEM fakultas mengenali basis massanya sendiri. Komitmen awal pada aksi damai dan disiplin untuk tetap berada dalam koridor instruksi organisasi membuat aksi selesai secara kondusif. Perbandingan fungsi TikTok pada kedua fase disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Fungsi TikTok pada Fase Pra-Aksi dan Fase Pelaksanaan Aksi

Aspek	Fase Pra-Aksi	Fase Pelaksanaan Aksi
Fungsi utama	Penggalangan opini dan ajakan massa	Dokumentasi dan pemantauan visual
Aktor pengelola	Seluruh simpul massa dan warganet umum	Tim media aliansi mahasiswa
Ketergantungan pada algoritma	Tinggi (menentukan jangkauan FYP)	Rendah (dokumentasi bersifat langsung)
Kerentanan terhadap gangguan sinyal	Rendah (konten dapat diakses ulang kapan saja)	Tinggi (siaran langsung membutuhkan koneksi stabil)
Sumber otoritas informasi	Konten digital (FYP dan akun aliansi)	Orasi mobil komando dan koordinator simpul

(Sumber: Hasil wawancara, diolah 2026)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa kedua fase memiliki karakteristik yang hampir berlawanan, baik dari segi ketergantungan teknis maupun sumber otoritas informasi. Karena fase pelaksanaan sejak awal tidak digantungkan pada infrastruktur digital, aliansi tetap solid ketika jaringan terganggu. Hasil akhirnya, aksi berlangsung damai dan kenaikan PBB-P2 dibatalkan. Ketua BEM merangkumnya dengan menyatakan

bahwa pendapat yang disampaikan "dengan baik-baik juga diterima. PBB-nya kan dibatalkan, tidak jadi naik" (Wawancara, Ketua BEM, 2025).

Connective Action dan Collective Action dalam Satu Gerakan

Dominannya peran TikTok pada fase pra-aksi selaras dengan *logic of connective action* (Bennett & Segerberg, 2012), ketika partisipasi terbangun melalui jejaring digital yang personal dan horizontal. Karakteristik *low-cost participation* dan *viral mobilization* (Tufekci, 2017) tampak dari pengakuan peserta yang merasa "tidak berjuang sendirian" setelah menonton konten ajakan. Namun, penelitian ini juga menemukan batas teori tersebut. Pada momen kritis di lapangan, terutama saat jaringan terganggu, koordinasi kembali ke logika *collective action* yang hierarkis melalui koordinator simpul. Gerakan Aliansi Mahasiswa Malikussaleh dengan demikian tidak sepenuhnya cair dan tanpa pemimpin, tetapi bersifat hibrida: cair pada tahap penggalangan opini dan terstruktur pada tahap eksekusi. Kesadaran aktor terhadap kendali algoritma oleh pemilik platform dan pengalaman *shutdown* jaringan juga menegaskan sifat *fragile sustainability* yang dikemukakan Tufekci (2017), yaitu kekuatan aktivisme digital yang rapuh karena bertumpu pada infrastruktur yang dikendalikan pihak luar.

Dari perspektif perilaku kolektif (Smelser, 1962), kenaikan tarif hingga 280 persen merupakan ketegangan struktural (*structural strain*) yang dirasakan langsung oleh warga, sedangkan konten TikTok yang membingkai kenaikan tersebut berperan sebagai faktor pemercepat (*precipitating factor*). Proses *circular reaction* (Blumer, 1951) tampak ketika isu menjadi "obrolan hangat di mana-mana" dan memperkuat keputusan individu untuk bergabung. Akan tetapi, perilaku kolektif yang terbentuk tidak sepenuhnya spontan sebagaimana asumsi Smelser, karena keresahan tersebut dikanalisasi melalui forum tim kajian dan tim taktis BEM. Di titik ini, teori mobilisasi sumber daya (McCarthy & Zald, 1977) relevan: keberhasilan aksi bertumpu pada pengelolaan sumber daya organisasional secara rasional, yakni sistem koordinator simpul yang berfungsi sebagai rantai tanggung jawab, penyaring penyusup, sekaligus jaring pengaman ketika sumber daya digital terganggu. TikTok berperan sebagai sumber daya informasi berbiaya rendah yang memungkinkan kelompok dengan dana terbatas menggalang dukungan luas (Edwards & Gillham, 2013).

Aksi ini juga merupakan bentuk partisipasi politik non-konvensional (Marsh & Kaase, 1979) yang muncul ketika kanal representasi formal dianggap kurang responsif terhadap kebijakan fiskal yang membebani. Komitmen pada aksi damai mendukung argumen bahwa demonstrasi merupakan koreksi demokratis yang sah (Apriyani, 2021), dan keberhasilannya mendorong pembatalan kebijakan mencerminkan semakin kritisnya kelompok berpendidikan dalam menekan pengambil kebijakan secara terukur (Dalton, 2008). Perbandingan dengan kota lain di Aceh yang berujung ricuh menunjukkan bahwa partisipasi non-konvensional tidak identik dengan kekerasan, melainkan bergantung pada cara energi kolektif dikelola oleh struktur komandonya. Dalam kerangka gerakan sosial baru (Melucci, 1989), simbol-simbol seperti jas almamater, bendera, tagar, dan narasi damai mengikat identitas kolektif lintas fakultas, sementara upaya melindungi kehidupan ekonomi warga dari kebijakan birokrasi fiskal yang dinilai impersonal sejalan dengan gagasan Habermas (1981) tentang perlindungan *lifeworld* dari kolonisasi sistem.

Temuan ini juga memberikan refleksi terhadap konsep ruang publik digital. TikTok berhasil menjadi arena tempat warga mengartikulasikan kritik terhadap kebijakan daerah tanpa melalui media arus utama, sejalan dengan gagasan *mass self-communication* (Castells, 2012). Namun, gangguan jaringan pada saat aksi memperlihatkan kerapuhan mendasar ruang tersebut karena keberadaannya bergantung pada infrastruktur di luar kendali warga. Dibandingkan penelitian terdahulu, temuan ini menguatkan Perkasa

(2025) mengenai fungsi konten visual sebagai alat pembebasan kognitif, tetapi pada level kolektif kelembagaan. Temuan ini juga memperluas Apriyani (2021): pudarnya hierarki akibat digitalisasi bersifat kondisional karena hierarki dapat menguat kembali ketika kondisi lapangan menuntut kepastian komando. Sejalan dengan Rahmani et al. (2025), penelitian ini menambahkan pentingnya skenario cadangan non-digital ketika arus informasi digital terganggu, dan berbeda dengan Febriantin dan Anggrayni (2025), pola media sosial sebagai infrastruktur penguatan organisasi terbukti juga berlaku pada gerakan intelektual berbasis kampus.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa TikTok digunakan dalam dua fase yang berbeda fungsi dalam mobilisasi aksi menolak kenaikan PBB-P2 tahun 2025 di Kota Lhokseumawe. Pada fase pra-aksi, TikTok berfungsi sebagai sarana penggalangan opini dan ajakan massa melalui konten video pendek, satire, dan narasi aksi damai yang jangkauannya diperluas oleh tagar, penanda lokasi, interaksi pengguna, serta diteruskan melalui grup WhatsApp dan forum BEM. Pada fase pelaksanaan, TikTok hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi dan pemantauan massa, sedangkan instruksi lapangan berjalan melalui mobil komando dan koordinator simpul. Hambatan berupa gangguan jaringan, narasi tandingan buzzer, dan ketergantungan pada algoritma tidak menggagalkan aksi karena aliansi memiliki jalur komando fisik cadangan. Efektivitas konversi dari ruang digital menjadi aksi nyata di Gedung DPRK Lhokseumawe ditentukan oleh perpaduan hibrida antara *connective action* di ruang digital dan *collective action* konvensional di lapangan, yang berujung pada dicabutnya kenaikan tarif PBB-P2.

Bagi organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, penelitian ini menegaskan pentingnya menyiapkan skenario komunikasi cadangan berbasis struktur fisik serta meningkatkan literasi algoritma tanpa menggantungkan keberhasilan mobilisasi pada satu platform. Bagi Pemerintah Kota dan DPRK Lhokseumawe, praktik *social listening* di media sosial perlu dilakukan secara rutin sebagai deteksi dini aspirasi publik sehingga kebijakan sensitif seperti penyesuaian tarif pajak daerah dapat dikomunikasikan secara partisipatif sebelum ditetapkan. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena seluruh informan berasal dari internal aliansi, konten yang diamati terbatas pada enam unggahan hari aksi tanpa data jumlah tayangan, penyebab gangguan jaringan belum terkonfirmasi dengan data resmi operator, dan desain studi kasus tunggal tidak dimaksudkan untuk generalisasi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan informan dari pemerintah daerah, aparat keamanan, dan operator telekomunikasi, menerapkan analisis isi kuantitatif atau analisis jaringan (*network analysis*) terhadap akun dan tagar, serta melakukan studi komparatif antarkota di Aceh untuk mengidentifikasi faktor yang membedakan aksi yang berlangsung damai dan yang berujung ricuh.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R., Utama, P., & Lestari, S. (2025). Ruang publik digital dan discursive democracy dalam artikulasi politik lokal di Aceh. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, 11(2), 341–357.

Aliyan, M., & Anshar, F. (2025). Peran media digital mengadvokasi masyarakat dalam konflik tambang di Kabupaten Bantaeng. Jurnal Sosiologi Kontemporer, 4(1), 45–58.

Apriyani, T. (2021). Peran sosial media pada gerakan protes massa aksi dan demokrasi baru di era digital. Kalijaga Journal of Communication, 3(1), 17–30. https://doi.org/10.14421/kjc.31-02.2021

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Information, Communication & Society, 15(5), 739–768. https://doi.org/10.1080/1369118X.2012.670661

Bisnis.com. (2025, Agustus 15). Bukan efisiensi, Mendagri buka-bukaan pemicu pemda kerek tarif PBB. https://ekonomi.bisnis.com/read/20250815/259/1902898/bukan-efisiensi-mendagri-buka-bukaan-pemicu-pemda-kerek-tarif-pbb

Blumer, H. (1951). Collective behavior. Dalam A. M. Lee (Ed.), New outline of the principles of sociology (hlm. 165–222). Barnes & Noble.

Castells, M. (2012). Networks of outrage and hope: Social movements in the internet age. Polity Press.

Dalton, R. J. (2008). The good citizen: How a younger generation is reshaping American politics. CQ Press.

Damantu, S. E., & Arief, M. (2025). Gerakan sosial masyarakat: Aksi kolektif masyarakat Desa Lembobelala dalam menolak klaim lahan. Jurnal Polinter: Kajian Ilmu Politik, 3(1), 19–33.

Edwards, B., & Gillham, P. F. (2013). Resource mobilization theory. Dalam D. A. Snow, D. della Porta, B. Klandermans, & D. McAdam (Ed.), The Wiley-Blackwell encyclopedia of social and political movements. Blackwell.

Febriantin, R., & Anggrayni, D. (2025). Gerakan sosial politik buruh di Kabupaten Bekasi: Infrastruktur digital dan peluang politik. Jurnal Politik Lokal, 5(2), 112–126.

Habermas, J. (1981). The theory of communicative action, Vol. 2: Lifeworld and system: A critique of functionalist reason. Beacon Press.

Hukumonline. (2025a). Kenaikan pajak daerah jangan memberatkan rakyat. https://www.hukumonline.com/berita/a/kenaikan-pajak-daerah-jangan-memberatkan-rakyat-lt68a2bb5c9828a

Hukumonline. (2025b). Polemik kenaikan PBB-P2: CELIOS, pemda terjepit dana dari pusat dipangkas. https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-kenaikan-pbb-p2-celios--pemda-terjepit-dana-dari-pusat-dipangkas-lt68ac331d206cf

IKPI. (2025, Oktober 6). Pemkot Lhokseumawe kembalikan dana ke 1.180 warga karena pembatalan tarif PBB-P2 280 persen. https://ikpi.or.id/articles/pemkot-lhokseumawe-kembalikan-dana-ke-1180-warga-karena-pembatalan-tarif-pbb-p2-280-persen

Ismail, A., & Prananda, A. (2025). Gerakan aksi massa: Panduan strategi dan teknik demonstrasi efektif. Soegijapranata Catholic University Press.

Marsh, A., & Kaase, M. (1979). Measuring political action. Dalam S. H. Barnes & M. Kaase (Ed.), Political action: Mass participation in five Western democracies (hlm. 57–96). Sage.

McCarthy, J. D., & Zald, M. N. (1977). Resource mobilization and social movements: A partial theory. American Journal of Sociology, 82(6), 1212–1241.

Melucci, A. (1989). Nomads of the present: Social movements and individual needs in contemporary society. Temple University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (Edisi ke-3). SAGE Publications.

Musyrifah, W. A., & Edtiyarsih, D. D. (2025). Kenaikan pajak dan krisis kepercayaan publik: Analisis faktor pemicu gelombang demonstrasi di Indonesia tahun 2025. Jurnal Penelitian Nusantara, 6(2), 8–12.

Nugroho, A., Kusuma, W., & Almizani, A. A. (2025). Logic of connective action: Kajian sosiologis atas aksi demonstrasi tanpa pemimpin tahun 2025. Jurnal Sosiologi Politik, 4(12), 676–684.

Pemerintah Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Perkasa, A. N. (2025). Peran sosial media dalam mobilisasi aksi protes Reformasi Dikorupsi. Kusa Lawa, 5(2), 109–203. https://doi.org/10.21776/ub.kusalawa.2025.005.02.01

Rahmani, K., Syarif, H., & Fitriani, N. (2025). Aliansi GEBRAK dalam melaksanakan demonstrasi terhadap penolakan Omnibus Law. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 7(3), 210–225.

Sabrina, N. (2025). Sejarah demonstrasi Hari Buruh di Indonesia pada masa Orde Baru: Analisis teori konflik. Jurnal Qurthuba, 8(2).

Smelser, N. J. (1962). Theory of collective behavior. The Free Press.

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

TikTok. (2020, Juni 18). How TikTok recommends videos #ForYou. https://newsroom.tiktok.com/en-us/how-tiktok-recommends-videos-foryou

Tufekci, Z. (2017). Twitter and tear gas: The power and fragility of networked protest. Yale University Press.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (Edisi ke-6). SAGE Publications.